

IMPLEMENTASI PERKASAD NOMOR PERKASAD/36-02/XII/2012 MENGENAI PROGRAM TMMD DALAM RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN GUNA MENDUKUNG PERTAHANAN WILAYAH (STUDI KASUS PROGRAM TMMD KE-98 DI KODIM 0615/KUNINGAN TA 2017)

IMPLEMENTATION OF RULES OF THE ARMY CHIEF OF STAFF (PERKASAD) NUMBER PERKASAD / 36-02 / XII / 2012 CONCERNING INDONESIA NATIONAL ARMY TO CONSTRUCT VILLAGE (TMMD) PROGRAMS IN ORDER TO ACCELERATE DEVELOPMENT TO SUPPORT REGIONAL DEFENSE (CASE STUDY OF TMMD PROGRAM OF THE 98TH IN MILITARY DISTRICT COMMANDER (KODIM) 0615 / KUNINGAN IN 2017)

Untung Iswahyudi¹, Suhirwan², David Hutagaol³

Program Studi Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas
Pertahanan
(untung.iswahyudi@idu.ac.id)

Abstrak -- Program TMMD sebagai bagian dari Bakti TNI, merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh TNI bersama – sama dengan instansi pemerintah lainnya, untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat di daerah – daerah yang masih belum sejahtera. Dalam pelaksanaannya, program TMMD yang dilaksanakan oleh TNI untuk membantu pemerintah RI dalam percepatan pembangunan Indonesia dari daerah pinggiran, untuk memperkuat kemandirian TNI rakyat, dan mewujudkan pertahanan wilayah, menjadi terhambat karena banyak mengalami kesalahan dalam pengimplementasiannya. Tujuan dari penelitian yaitu untuk menganalisis implementasi Perkasad Nomor Perkasad/36-02/XII/2012 mengenai program TMMD dan dampaknya terhadap percepatan pembangunan, kemandirian TNI – Rakyat dan pertahanan wilayah di Kab. Kuningan. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari para informan yang ditetapkan yang selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perkasad Nomor Perkasad/36-02/XII/2012 mengenai program TMMD belum terlaksana secara maksimal, ditinjau baik segi isi kebijakan (*content of policy*) maupun dari konteks implementasinya (*contex impelementation*). Hal ini berdampak terhadap lambatnya percepatan pembangunan di wilayah yang masyarakatnya belum sejahtera, melemahkan kemandirian TNI – Rakyat, serta menghambat proses terwujudnya pertahanan wilayah. Upaya – upaya yang dapat dilaksanakan, adalah dengan menambah anggaran pembangunan fisik dari Pemda maupun penambahan uang makan dan uang saku bagi Satgas TMMD oleh Penanggung Jawab TMMD, penentuan sasaran TMMD yang harus *bottom up planning* sesuai dengan kriteria, pemberian pengetahuan dan keterampilan kepada personel Kodim 0615/Kuningan bekerjasama dengan Pemda, peningkatan peran Kementerian RI/LPNK dengan menyiapkan beras untuk masyarakat dilokasi TMMD dan sarana kontak dapat dikirim sebelum pelaksanaan TMMD.

Kata kunci: *implementasi, pembangunan, dan pertahanan*

Abstract -- The TMMD program as part of Devotion Indonesia National Army, is an activity carried out by the Indonesia National Army together with other government agencies, to help overcome the difficulties of the people in areas that are still not prosperous. In its implementation, the TMMD

¹ Program Studi Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

² Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

³ Program Studi Strategi Perang Semester, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

program implemented by the Indonesia National Army to assist the Indonesian government in accelerating Indonesia's development from the periphery, to strengthen the unity of the Indonesian people, and realize regional defense, has been hampered because many experienced errors in their implementation. The purpose of the research is to analyze the implementation of Perkasad Number Perkasad / 36-02 / XII / 2012 concerning TMMD program and its impact on the acceleration of development, the unity of the Indonesia National Army - People and regional defense in District Kuningan. Research uses qualitative methods. Data were obtained from the informants determined which were then analyzed by qualitative analysis techniques. The results show that the implementation of Perkasad Number Perkasad / 36-02 / XII / 2012 concerning TMMD program has not been implemented optimally, in terms of both the content of policy and the context of its implementation (context implementation). This has resulted in the slow pace of development in areas where the people have not prospered, weakened the unity of the Indonesia National Army - People, and hampered the process of the realization of regional defense. Efforts that can be implemented are by increasing the physical development budget of the Regional Government as well as adding food and pocket money to the TMMD Task Force by the TMMD Person in charge, determining TMMD targets that must be bottom up planning in accordance with criteria, providing knowledge and skills personnel to Kodim 0615 / Kuningan cooperates with the local government, enhances the role of the Ministry of Republic of Indonesia / LPNK by preparing rice for the community in the TMMD location and the means of contact can be sent before the TMMD implementation.

Keywords: implementation, development and defense

Pendahuluan

Kegiatan pembinaan teritorial dilaksanakan oleh TNI pada masa damai, selama perang dan sesudah perang, serta pada tugas operasi militer selain perang baik yang bersifat tempur maupun bersifat non tempur. Dalam penyelenggaraan Bakti TNI, TNI AD berpedoman kepada Perkasad/36-02/XII/2012 tentang Bakti TNI, yang berisi tentang peran TNI sebagai komponen utama dalam kegiatan pembinaan teritorial, diarahkan untuk membantu menyelenggarakan kegiatan kemanusiaan (Civic Mission), untuk menangani masalah – masalah sosial dan

kemanusiaan atas permintaan instansi terkait dan atau atas inisiatif sendiri, yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan instansi terkait tanpa mengabaikan kesiapan satuan,⁴ dengan penyediaan sarana dan prasarana kebutuhan yang memenuhi aspek kesejahteraan masyarakat dan bermanfaat untuk pertahanan negara.⁵ Oleh karena itu, pembangunan yang dilaksanakan oleh TNI harus bersifat selaras dan seimbang, yaitu perencanaan dan pelaksanaannya mengandung keseimbangan antara kepentingan kesejahteraan masyarakat, dan

⁴ Buku Petunjuk Teknik Tentang Bakti TNI Nomor: Perkasad/36-02/XII/2012, p. 4.

⁵ *Ibid.*, p. 17.

kepentingan pertahanan, serta selaras dengan pembangunan daerah.⁶

Salah satu kegiatan operasi bakti TNI adalah Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), yang merupakan program terpadu, lintas sektoral antara TNI, Polri, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan Pemerintah Daerah serta komponen bangsa lainnya, yang dilaksanakan secara terintegrasi bersama masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana di daerah yang sudah ada program pembangunan desa namun belum terjangkau pelaksanaannya oleh pemerintah daerah, daerah rawan ditinjau dari segi pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan, daerah bencana alam dan terancam bencana alam, daerah terisolir, daerah perbatasan, daerah terpencil dan daerah miskin/kumuh perkotaan.⁷

Agar pelaksanaan TMMD dapat menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat, maka yang perlu diperhatikan adalah pentingnya pembagian kelompok tenaga ahli dalam melaksanakan sasaran

fisik, karena ada sasaran fisik yang betul-betul perlu tenaga ahli seperti pembangunan rumah maupun pembuatan jembatan⁸ yang pelaksanaannya mengedepankan peran aktif masyarakat tanpa niatan untuk mengambil alih tanggung jawab masyarakat/instansi lainnya dalam pembangunan.⁹ Kemudian, agar pelaksanaan TMMD dapat menyentuh pertahanan wilayah, dimana setiap masyarakat memiliki kesadaran bela negara, maka dilaksanakan kegiatan non fisik, yang berkaitan dengan pembinaan mental spiritual atau kejuangan guna menumbuhkan kesadaran masyarakat.¹⁰

Hal yang tidak kalah pentingnya sebagai proses purna TMMD adalah, terwujudnya Pemda yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan hasil – hasil TMMD, sehingga dapat dirasakan dan dinikmati serta dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.¹¹ Untuk itu, sebagai bagian dari tugas Binter maka Komando Kewilayahan menghimbau Pemda untuk melakukan peningkatan kualitas hasil TMMD yang memiliki nilai

⁶ *Ibid.*, p. 6.

⁷ Buku Petunjuk Teknik Tentang Bakti TNI Nomor: Perkasad/36-02/XII/2012, p. 14.

⁸ Buku Petunjuk Teknik Tentang Bakti TNI Nomor: Perkasad/36-02/XII/2012, p. 11.

⁹ Buku Pedoman TNI Manunggal Membangun Desa Tahun Anggaran 2018, Buku IV, Nomor : Kep/01/XI/2017, p.12.

¹⁰ Buku Petunjuk Teknik Tentang Bakti TNI Nomor: Perkasad/36-02/XII/2012, p. 17.

¹¹ Buku Petunjuk Teknik Tentang Bakti TNI Nomor: Perkasad/36-02/XII/2012, p. 28.

taktis, seperti jalan hasil TMMD yang semula kelas III dapat ditingkatkan menjadi jalan kelas II atau kelas I agar dapat dilalui oleh kendaraan lapis baja.¹²

Upaya untuk membantu kesulitan masyarakat dan membantu Pemda dalam Percepatan pembangunan telah dilaksanakan oleh Kodim 0615/Kuningan pada saat melaksanakan kegiatan TMMD ke-98 TA 2017. Namun hasil temuan dari Tim Wasev PJO (Penanggung Jawab Operasional) TMMD pelaksanaanya belum melibatkan personel intelijen dan dukungan yang diberikan oleh Pemda juga sangat sedikit, selain itu ada indikasi bahwa penentuan sasaran tidak dilaksanakan secara *Bottom Up Planning*, sehingga memberikan dampak pembangunan kurang memenuhi aspek kesejahteraan masyarakat dan kurang mengena dari segi manfaat untuk pertahanan negara. Keberadaan personel Satgas yang tidak mempunyai keahlian khusus seperti tenaga tukang, berpotensi menghambat lancarnya pengerjaan sasaran fisik. Sedangkan kegiatan sasaran non fisik dengan waktu terbatas, juga belum menyentuh dan belum dapat membangkitkan mental spiritual atau kejuangan masyarakat dalam bela negara.

Kemudian adanya kerusakan hasil TMMD, akibat belum adanya dukungan anggaran perawatan / pemeliharaan dari Pemda, sehingga manfaat tidak dapat dirasakan dan dinikmati dalam jangka waktu yang lama, serta tidak dapat dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, sebagaimana yang disampaikan oleh Bagman dan Taylor, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan Kirk dan Miller, mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial, yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.¹³

Subjek dalam penelitian menggunakan 6 (enam) orang informan yang terdiri dari : 1 orang pejabat

¹² *Ibid.*, p. 28.

¹³ Sudarto. 1995. Metodologi Penelitian Filsafat, Jakarta. Raja Grafindo Persada. P. 62.

Dandim/Kasdim/Pasiter, 1 orang pejabat Danramil, 1 orang pejabat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 1 orang tokoh masyarakat, 1 orang tokoh pemuda, dan 1 orang pejabat dari Spaban V/Bakti TNI Sterad. Dengan Lokasi penelitian berada di Kodim 0615/Kuningan, Korem 063/Sunan Gunung Jati, Kodam III/Siliwangi yang terletak di Kabupaten Kuningan.

Objek penelitian ini adalah mengenai implementasi pelaksanaan Perkasad/36-02/XII/2012 mengenai program TNI Manunggal Membangun Desa ke-98 yang telah dilaksanakan oleh Kodim 0615/Kuningan pada TA 2017. Hal ini menjadi penting untuk dibahas, karena untuk mengetahui sejauh mana implementasi sesuai Perkasad yang berlaku, serta bagaimana peranan dari TMMD tersebut terhadap percepatan pembangunan di wilayah Kab. Kuningan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa metode wawancara dan metode dokumentasi. Dalam pemeriksaan terhadap data yang telah terkumpul, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Kemudian untuk teknis analisis data, menggunakan cara yang disampaikan oleh Miles and Huberman, yang meliputi

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian dan Pembahasan implementasi Perkasad/36-02/XII/2012, serta pelaksanaan percepatan pembangunan

Kab. Kuningan terletak diantara 6° 47' s.d 7° 12' Lintang Selatan (LS) dan 108° 23' s.d 108° 47' Bujur Timur (BT), dengan Kuningan sebagai ibu kotanya, yang terletak antara 6° 58' s.d 6° 59' LS dan 108° 27' s.d 108° 28' BT. Luas wilayah Kab. Kuningan sebesar 1.195,71 Km² yang terdiri dari 32 Kecamatan. Jumlah penduduk sebanyak 1.102.354 orang, dengan penduduk laki-laki sebanyak 549.118 orang dan penduduk perempuan sebanyak 553.236 orang dengan sex ratio sebesar 99,3% artinya jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Kepadatan Penduduk wilayah Kab. Kuningan yang berkisar 883 orang / Km², dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) sebesar 1,17% pertahun, dibawah laju pertumbuhan Provinsi yang mencapai 1,83%. Usia produktif di Kab. Kuningan tercatat sejumlah 501.557 orang, dengan pekerjaan didominasi sebagai petani, industri kerajinan rumah tangga dan pengangkutan, sedangkan 416 orang tercatat lain – lain. Pendidikan masyarakat

sendiri rata – rata hanya sampai dengan tingkat SLTP/ sederajat, dan masyarakat yang menempuh pendidikan tingkat SMU / Sederajat keatas lebih kecil dibanding dengan masyarakat yang berpendidikan SD / sederajat.

Kodim, adalah Komando pelaksana Komando Daerah Militer/Komando Resort Militer (Kodam/Korem), bersifat kewilayahan yang berkedudukan langsung di bawah Panglima Daerah Militer/Komandan Resort Militer (Pangdam/Danrem). Kodim bertugas pokok menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan, menyelenggarakan pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan wilayahnya dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam/Korem. Untuk melaksanakan tugas pembinaan teritorial tersebut, Kodim melaksanakannya bersama – sama dengan pemerintah Daerah dan instansi pemerintah lainnya yang terkait, serta komponen bangsa lainnya yang sifatnya lintas sektoral. Tugas tersebut dilaksanakan untuk menyiapkan dan membina segenap potensi yang ada diwilayah darat untuk dijadikan sebagai kekuatan pertahanan darat yang meliputi Ruang, Alat dan Kondisi Juang yang

tangguh sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Kegiatan penyiapan dan pembinaan pemberdayaan wilayah pertahanan darat oleh TNI tersebut dikemas dalam kegiatan yang disebut dengan Program Bakti TNI, yang dilaksanakan untuk membantu kesulitan masyarakat sampai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya peran TNI yang hadir untuk membantu kesulitan masyarakat, diharapkan dapat semakin memperkuat kemandirian TNI - Rakyat.

Tugas membantu mengatasi kesulitan masyarakat dalam program bakti TNI, telah dilaksanakan oleh Kodim 0615/Kuningan yang telah menyelenggarakan kegiatan TMMD ke-98 TA 2017, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan di Desa Sindang, Kec. Lebakwangi, Kab. Kuningan, sebagai upaya untuk membantu Pemda Kab. Kuningan dalam mengatasi kesulitan masyarakat yang berada di wilayah Kab. Kuningan, serta untuk memperkuat kemandirian TNI – Rakyat serta mendukung pertahanan wilayah. Untuk itu, maka pembahasan penelitian ini akan difokuskan kepada implementasi Perkasad-36/2012 berkaitan dengan isi kebijakan dan lingkungan Kebijakan, serta

pelaksanaan pembangunan masyarakat itu sendiri.

Implementasi Perkasad-36/2012 berkaitan dengan isi kebijakan, diperoleh data sebagai berikut:

- 1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan (*Interest Affected*).** Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi Perkasad-36/2012 terkait dengan Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan belum sesuai dengan implementasi kebijakan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan dalam pemilihan sasaran oleh para penentu kebijakan berdasar kepada kondisi wilayah yang benar – benar kurang dari aspek kesejahteraan dan aspek stabilitas daerah, dan memang layak untuk dijadikan wilayah lokasi sasaran TMMD masih tidak terlalu diperhatikan. Sebenarnya secara teknis masih dapat dikoordinasikan antar penentu kebijakan dengan baik. akibatnya penentuan lokasi sasaran TMMD yang tidak tepat ditinjau dari aspek kesejahteraan dan aspek stabilitas daerah.
- 2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan (*Type of Benefits*).** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perkasad-36/2012 berkaitan dengan kualitas dan terpeliharanya hasil – hasil

pelaksanaan TMMD belum terpenuhi, sehingga implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Hal ini dapat diketahui dari sasaran fisik yang sudah ada mengalami kerusakan. dan kondisinya tidak terawat, sehingga manfaat yang dapat diambil bagi masyarakat tidak optimal.

- 3. Derajat perubahan yang ingin dicapai (*Extent of Change Envision*).** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perkasad-36/2012 berkaitan dengan perubahan yang ingin dicapai pada kesadaran untuk bela negara dan wawasan kebangsaan belum tercapai dengan baik. Tujuan non fisik belum sesuai dengan yang diinginkan, dengan waktu yang sangat terbatas tidak dapat mempengaruhi, merubah, dan memberikan manfaat secara maksimal kepada masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 4. Letak Pengambilan Keputusan (*Site of Decision Making*).** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perkasad-36/2012 berkaitan dengan letak pengambilan keputusan telah terlaksana dengan baik. hal ini dapat terlihat dari ketepatan dalam penentuan sasaran TMMD, yang diarahkan kepada daerah – daerah yang

tertinggal secara ekonomi, dan masyarakat belum sejahtera.

5. Pelaksana program (Program Implementor):

a. Dukungan dari PJO TMMMD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkasad-36/2012 belum dapat diimplementasikan dengan optimal. TNI pada pelaksanaan TMMD dalam mewujudkan kemanunggalan TNI – Rakyat, terhambat oleh permasalahan personel Satgas yang tinggal bersama masyarakat, karena dengan dukungan uang makan yang kecil, dapat membebani masyarakat itu sendiri yang pada dasarnya masih banyak yang belum sejahtera.

b. Dukungan dari Pemda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Perkasad-36/2012 belum dapat dilaksanakan oleh Pemda dengan optimal. Peranan Pemda dalam kegiatan TMMD masih sangat kurang, hal ini dapat dilihat dari dukungan anggaran yang kecil, sehingga Satgas TMMD sulit untuk mengejar hasil pembangunan dengan kualitas yang baik. Kemudian Pemda juga belum menyiapkan dukungan makan bagi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan TMMD, hal ini berdampak terhadap

kurangnya minat masyarakat untuk turut serta secara optimal dalam kegiatan TMMD, karena masyarakat yang kondisinya masih belum sejahtera, juga harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hariannya.

c. Dukungan dari Kementerian RI/LPNK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Perkasad-36/2012 belum terlaksana secara optimal. Dukungan sarana kontak yang diberikan oleh Kementerian RI/LPNK terlambat diterima oleh masyarakat, dan ada juga yang tidak sampai. Sehingga tujuan awal sarana kontak dari Kementerian RI/LPNK untuk memperbesar pencapaian hasil kegiatan TMMD, belum dapat tercapai secara optimal.

5. Sumber daya yang dikerahkan (Resources Committed). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sumber daya yang dikerahkan, pelaksanaan implementasi Perkasad-36/2012 telah sesuai dengan yang diharapkan. Satgas TMMD, Pemda dan Masyarakat telah bersama - sama mengerahkan sumberdaya yang dimiliki baik untuk pengerjaan sasaran fisik maupun untuk mendukung pelaksanaan sasaran non fisik. Kemudian dengan anggaran dan

waktu yang terbatas, TMMD masih dapat dilaksanakan dengan pencapaian sasaran 100 % dan bahkan ada beberapa sasaran yang *over prestasi*.

Implementasi Perkasad-36/2012 berkaitan dengan Lingkungan kebijakan, diperoleh data sebagai berikut:

- 1. Kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat (*Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*).** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat, dalam hal ini mengenai pemahaman kepentingan program TMMD sesuai Perkasad-36/2012 telah dapat diimplementasikan dengan baik, karena masyarakat telah diorganisir oleh Kades dengan dibagi menjadi kelompok – kelompok berkekuatan 50 orang setiap harinya untuk dilibatkan dalam kegiatan TMMD.
- 2. Karakteristik lembaga dan penguasa (*Institution and Regime Characteristic*).** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perkasad-36/2012 terkait dengan Karakteristik lembaga dan penguasa sudah sesuai dengan implementasi kebijakan yang diharapkan. Pejabat Pemda maupun Kodim memiliki peranan dalam pelaksanaan TMMD. Pemda

memberikan personel sebagai tenaga teknis dan pendukung materi non fisik, sedangkan Kodim mendukung pelaksanaan TMMD dari pengerjaan sasaran fisik.

- 3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perkasad-36/2012 terkait dengan Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran sudah sesuai dengan implementasi kebijakan yang diharapkan. Yaitu dengan keterlibatan masyarakat untuk mendukung kegiatan TMMD secara bergotong royong, dengan waktu pelaksanaan mengikuti jadwal yang sudah dibuat oleh Kades

Pelaksanaan pembangunan masyarakat untuk percepatan pembangunan, diperoleh data sebagai berikut:

- 1. Transparansi (*keterbukaan*).** Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran dalam menentukan pembangunan, sehingga transparansi (*keterbukaan*) telah sesuai dengan yang diinginkan. Dalam penentuan sasaran TMMD dilaksanakan melalui proses *bottom up planning*, yang artinya adalah masyarakat telah dilibatkan didalam proses pembangunan dengan

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan sasaran fisik yang memang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan sehari – hari.

2. Partisipasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan telah sesuai dengan yang diharapkan, karena pelaksanaan TMMD didukung oleh partisipasi masyarakat dengan melaksanakan kegiatan TMMD secara bergotong royong.

3. Dapat dinikmati masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat telah sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terlihat dari hasil pembangunan kegiatan TMMD yang dilaksanakan pada tahun 2017, telah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sampai dengan saat ini.

4. Dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan TMMD dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas) secara undang – undang, maka pelaksanaannya telah sesuai dengan yang diharapkan. dalam pelaksanaan TMMD, Kodim tidak menerima uang namun mendapatkan barang dari Pemda setelah proses lelang.

5. Berkelanjutan (sustainable). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip berkelanjutan belum dapat terealisasi dengan baik. Hal ini disebabkan belum adanya anggaran dari Pemda Kab. Kuningan untuk peningkatan maupun perawatan hasil TMMD.

Kesimpulan

Berdasar kepada analisis dari hasil temuan penelitian tersebut diatas dengan dihadapkan kepada teori – teori yang dipilih sebagai dasar pemikiran, maka Implementasi Perkasad-36/2012 mengenai program TMMD dalam rangka percepatan pembangunan guna mendukung pertahanan wilayah (studi kasus program TMMD ke-98 di Kodim 0615/Kuningan Ta 2017), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Perkasad-36/2012 berkaitan dengan isi kebijakan. Isi kebijakan dari Perkasad-36/2012 terkait dengan pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa yang telah dilaksanakan di wilayah Kodim 0615/Kuningan belum sepenuhnya terimplementasi. Hal ini disebabkan oleh adanya kepentingan dalam pemilihan lokasi sasaran TMMD yang belum tepat ditinjau dari aspek kesejahteraan dan aspek stabilitas daerah, sehingga kepentingan yang

terpengaruhi oleh kebijakan (*Interest Affected*) belum terimplementasi dengan baik. Kemudian dengan adanya kerusakan hasil pelaksanaan TMMD, menyebabkan jenis manfaat yang akan dihasilkan (*Type of Benefits*) belum tercapai dengan baik. Sedangkan dengan belum adanya perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menunjukkan berderajat perubahan yang ingin dicapai (*Extent of Change Envision*) belum tercapai sesuai yang diharapkan. Dukungan uang saku dan uang makan yang telah diberikan oleh PJO TMMD, dukungan anggaran dari Pemda, dan dukungan sarana kontak dari Kementerian RI/LPNK juga belum sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Satgas, sehingga pelaksana program (Program Implementor) belum sesuai harapan. Namun bila dilihat dari penentuan sasaran TMMD dengan pendekatan ekonomi kesejahteraan masyarakatnya, maka letak Pengambilan Keputusan (*Site of Decision Making*) telah sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian dengan adanya kerjasama yang baik dari Satgas TMMD, Pemda dan masyarakat, maka dari waktu pelaksanaan TMMD yang terbatas, seluruh sasaran dapat

diselesaikan tepat waktu bahkan beberapa sasaran mencapai over prestasi.

2. Implementasi Perkasad-36/2012 berkaitan dengan lingkungan kebijakan. Lingkungan kebijakan dari Perkasad-3/2012 terkait dengan pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa yang telah dilaksanakan di wilayah Kodim 0615/Kuningan telah terimplementasi dengan baik. Hal ini dilihat dari peran masyarakat telah diorganisir untuk dilibatkan dalam pelaksanaan TMMD, sehingga kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat (*Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*) telah sesuai dengan yang diharapkan. peranan dari Pemda dan Kodim sendiri yang telah melibatkan personel – personelnnya untuk mendukung pengerjaan sasaran fisik dan non fisik pada pelaksanaan TMMD, menjadikan karakteristik lembaga dan penguasa (*Institution and Regime Characteristic*) sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian dari kemauan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan TMMD secara bergotong royong, menyebabkan tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran juga telah sesuai dengan yang diharapkan

3. Pelaksanaan percepatan pembangunan. Pelaksanaan percepatan pembangunan masyarakat secara umum telah terlaksana dengan baik dan sesuai harapan, dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan dan aspek stabilitas daerah dilihat dari transparansi (keterbukaan) penentuan sasaran yang dilaksanakan secara *bottom up* dan *top down planning*, partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan TMMD secara bergotong royong, hasil pelaksanaan TMMD yang dapat dinikmati oleh masyarakat, pelaksanaan TMMD yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas) dengan dukungan dari Pemda yang diterima dalam bentuk barang sehingga tidak ada kemungkinan penyalahgunaan oleh Satgas TMMD. Namun dengan belum adanya dukungan anggaran peningkatan dan perawatan hasil TMMD dari Pemda, menyebabkan prinsip berkelanjutan (*sustainable*) belum terlaksana dengan baik dan belum sesuai harapan.

Kesimpulan

Berdasarkan kepada kesimpulan tersebut diatas, maka peneliti memberikan

rekomendasi sebagai tindak lanjut terhadap permasalahan sesuai temuan pada saat penelitian sebagai berikut:

1. Peningkatan peran Pemda dalam kegiatan TMMD. Prinsip dalam pembangunan pembangunan adalah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tersedianya infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka peran pemda dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Untuk menjamin bahwa hasil pembangunan fisik pelaksanaan TMMD dapat dipergunakan oleh masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Untuk mengejar kualitas hasil sasaran fisik agar dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang lama, maka seharusnya dari pihak Pemda sendiri dapat menyiapkan anggaran yang sebanding dengan sasaran fisik yang akan dikerjakan. Kemudian, Pemda juga sudah menyiapkan anggaran untuk peningkatan atau pemeliharaan hasil – hasil TMMD setelah pekerjaan TMMD selesai, sehingga hasil TMMD tersebut dapat dipergunakan dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka waktu

yang lama guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk masyarakat sendiri, dapat ikut berperan memelihara infrastruktur yang ada dengan menggunakannya dengan memperhatikan batas kemampuan. Seperti pelarangan penggunaan jalan untuk pengangkutan barang dengan tonase berat.

- b. Penentuan lokasi sasaran TMMD harus benar – benar dapat dipantau ketepatannya oleh Bupati dan Dandim selaku *stake holder* diwilayah. Sehingga pelaksanaan TMMD dapat benar – benar dilaksanakan di wilayah yang kondisi masyarakatnya belum sejahtera, dan dapat menjadi titik nol bagi kelanjutan pembangunan di wilayah Kab. Kuningan. Sehingga ketepatan dalam penentuan sasaran lokasi TMMD tersebut akan berpengaruh terhadap kecepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat yang berimbas terhadap kemajuan daerah lainnya.

2. Pemberian pengetahuan dan keterampilan kepada personel Kodim 0615/Kuningan. Personel Satkowil mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan pembinaan teritorial untuk

memperkuat pertahanan wilayah. Maka diperlukan personel yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan keahlian yang mendukung tugas. Kualitas yang dimaksud adalah pengetahuan dan kemampuan teknis yang sifatnya aplikatif yang dapat disampaikan secara langsung kepada masyarakat Kab. Kuningan, untuk itu maka pihak Kodim 0615/Kuningan dapat bekerjasama dengan pihak Pemda untuk melibatkan personel – personelnnya (Babinsa) pada setiap pelaksanaan pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh Pemda. Sehingga dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, peranan personel Kodim (Babinsa) juga akan membantu tugas Pemda dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan pelatihan kepada masyarakat yang menjadi wilayah binaannya.

3. Peningkatan peran Kementerian RI/LPNK dalam kegiatan TMMD.

Mengingat bahwa kegiatan TMMD merupakan kegiatan lintas sektoral yang juga melibatkan Kementerian RI/LPNK, maka peranan instansi pemerintah tersebut juga harus ditingkatkan.

- a. Peranan Kementerian RI/LPNK dimaksud adalah dilatarbelakangi oleh dukungan PJO TMMMD yang ada hanya diberikan untuk personel Satgas TMMMD saja, maka lebih tepat bila Kementerian RI/LPNK juga dapat menyiapkan dukungan beras bagi masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan TMMMD untuk keperluan makan selama pelaksanaan TMMMD, dihadapkan kepada lokasi sasaran TMMMD merupakan wilayah yang masyarakatnya belum sejahtera. diharapkan masyarakat akan lebih termotivasi untuk ikut berperan serta mengikuti kegiatan TMMMD.
- b. Dukungan sarana kontak bagi masyarakat, seperti semen, sarana olah raga, buku agama, buku bela negara dan sebagainya, dapat diberikan kepada masyarakat dilokasi TMMMD sebelum pelaksanaan TMMMD, dengan teknis pengiriman diarahkan ke Kodim yang akan melaksanakan kegiatan TMMMD. sehingga dengan ketepatan waktu diterima masyarakat, dukungan kementerian RI/LPNK akan jauh lebih tepat guna untuk membantu terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

4. Meningkatkan dukungan anggaran uang saku dan uang makan bagi personel Satgas TMMMD. Dihadapkan dengan lokasi pelaksanaan TMMMD yang mayoritas dilaksanakan di wilayah yang tertinggal dari daerah sekitarnya dengan masyarakatnya belum sejahtera, yang menyebabkan barang – barang kebutuhan pokok juga mahal. Maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan TMMMD, dukungan uang makan dan uang saku bagi personel Satgas TMMMD dapat ditambah dengan memperhatikan tipologi wilayah lokasi sasaran TMMMD. Hal ini menjadi penting untuk menjaga moral personel Satgas TMMMD, sekaligus agar keberadaan Satgas TMMMD selama tinggal bersama masyarakat, tidak membebani masyarakat yang secara umum masih belum sejahtera.

Daftar Pustaka

Buku

- Indrawijaya, Ibrahim, Adam. 2014. Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi. Bandung. PT Refika Aditama.
- Jamaludin, Nasrullah, Adon. 2015. Sosiologi perdesaan, Bandung. Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Cetak Kesebelas, Edisi Revisi IV. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi,

Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori & Praktek*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Zulkarimen. 2001. *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.
- Tresiana, Novita dan Duadji, Noverman. 2017. *Kebijakan Publik Teori dan Praktek Model - Model Pengelolaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta. Suluh Media.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung.
- Sulila, Ismet. 2012. *Implementasi Dimensi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Umar, Husein. 2001. *Strategic Management in Action*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,

Pemberitaan Media dan Internet

- “Pikiran rakyat: Jaringan Teroris Menyusup ke Kuningan” dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2009/02/26/85425/jaringan-teroris-menyusup-ke-kuningan>
- Nurjanah, “Pojok Jabar.com: Waduh, Ada Warga Kuningan yang Masuk DPO Teroris di Filipina, dalam <http://jabar.pojoksatu.id/pantura/2017/06/02/waduh-ada-warga-kuningan-yang-masuk-dpo-teroris-di-filipina/>
- Mustawan, Agus. “Kuninganmass: terduga teroris yang tewas ditembak mati lahir di kuningan”, dalam <https://kuninganmass.com/incident/terduga-teroris-yang->

tewas-ditembak-mati-lahir-di-kuningan/

Peraturan

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan Pembangunan Desa
- Buku Pedoman TNI Manunggal Membangun Desa Tahun Anggaran 2018, Buku IV, Nomor: Kep/01/XI/2017
- Buku Petunjuk Teknik Tentang Bakti TNI Nomor: Perkasad/36-02/XII/2012.

